



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2019-2020 |
| Masa Persidangan | : IV |
| Rapat Ke | : 14 |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja |
| Dengan | : Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pelaksana BPKH |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari, Tanggal | : Selasa, 7 Juli 2020. |
| Waktu | : Pukul 10.00 WIB. |
| Tempat | : Virtual / Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270. |
| Acara | : <ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Mekanisme Keputusan Menteri Agama No. 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji.2. Evaluasi Kinerja dan Anggaran Program Penanggulangan Dampak Covid 19 di Madrasah dan Pesantren.3. Realokasi Anggaran Ditjen PHU Kemenag TA 20204. Isu – Isu Aktual dan Solusinya |
| Ketua Rapat | : H.YANDRI SUSANTO, SPT. |
| Sekretaris Rapat | : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. |
| Hadir | : <ol style="list-style-type: none">1. 49 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI.2. 2 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin.3. Menteri Agama RI Beserta Jajaran.4. Kepala Badan Pelaksana BPKH Beserta Jajaran |

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.29 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, Wakil Ketua Laksdya

dari pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 1441 H/2020 M sebesar Rp146.682.427.233,- (*seratus empat puluh enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang akan digunakan untuk:

| No | Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|----|--|----------------|
| a. | Dukungan operasional untuk asrama haji yang terdampak Covid-19 dalam rangka menanggulangi pembayaran langganan daya dan jasa, gaji karyawan asrama, operasional perkantoran lainnya yang selama ini mengandalkan penerimaan sewa asrama haji (PNBP) serta mendukung pembiayaan asrama haji yang digunakan untuk isolasi ODP dan PDP Covid-19 | 23.061.765.320 |
| b. | Dukungan operasional penunjang penanganan Pandemi Covid-19 untuk 538 Satker Ditjen PHU dalam rangka menghadapi pola kerja New Normal | 14.909.860.000 |
| c. | Bantuan dukungan operasional Rumah Sakit Haji Jakarta dalam rangka penanganan pasien Covid-19 <i>(dialokasikan dari anggaran Ditjen PHU ke anggaran Ditjen Pendidikan Islam)</i> | 6.700.000.000 |
| d. | Sosialisasi Bantuan Operasional Pondok Pesantren dan Lembaga Keagamaan Islam <i>(dialokasikan dari anggaran Ditjen PHU ke anggaran Ditjen Pendidikan Islam)</i> | 4.300.000.000 |
| e. | Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi UMK <i>(dialokasikan dari anggaran Ditjen PHU ke anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)</i> | 16.075.113.000 |
| f. | Kegiatan Jagong Masalah Umrah dan Haji (Jamarah) di 34 Provinsi | 11.234.048.000 |
| g. | Diseminasi terkait pembatalan keberangkatan Jemaah Haji tahun 2020 dalam rangka sosialisasi kepada Jemaah Haji dan masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota | 26.480.253.000 |
| h. | Pembinaan KBIHU yang terdampak Covid-19 untuk melakukan pembinaan kepada Jemaah Haji binaannya yang dibatalkan tahun ini | 11.150.437.000 |
| i. | Peningkatan kualitas dan kuantitas pembimbing ibadah melalui penyiapan tenaga pembimbing ibadah yang berkualitas | 4.946.261.000 |
| j. | Penguatan sistem informasi haji melalui peremajaan perangkat SISKOHAT untuk penguatan Data Center Haji | 4.653.000.000 |

| No | Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|----|--|------------------------|
| k. | Penyusunan dan penyempurnaan berbagai regulasi turunan dari amanat UU nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta mensosialisasikan kepada masyarakat | 7.331.194.000 |
| l. | Perbaikan/renovasi ruang pelayanan haji dan penyelesaian pembangunan proyek yang terhenti akibat keterbatasan anggaran atau waktu | 13.480.899.913 |
| m. | Penyelesaian lanjutan penyiapan layanan di Arab Saudi yang terhenti akibat pandemi Covid-19 | 1.771.820.000 |
| n. | Pembahasan BPIH tahun 1442H/2021M lebih awal. | 587.776.000 |
| | Total | 146.682.427.233 |

4. Komisi VIII DPR RI menyetujui penggunaan Nilai Manfaat BPKH Tahun 2020 untuk anggaran operasional BPIH tahun 1441 H/2020 M yang sudah dilaksanakan sebesar Rp7.194.288.838,- untuk kegiatan:
- a. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebesar Rp6.619.779.078,- untuk pengadaan dan pengiriman gelang identitas jemaah haji reguler dan cetak buku manasik haji.
 - b. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sebesar Rp574.509.760,- untuk pengadaan dan pengiriman identitas jemaah haji khusus dan cetak buku manasik haji.
- Dengan catatan, anggaran untuk pengadaan dan pengiriman gelang identitas jemaah dan cetak buku manasik haji, baik Haji Reguler maupun Haji Khusus, tidak dianggarkan kembali pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.
5. Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan Kepala Badan Pelaksana BPKH sebagai berikut:
- a. Penggunaan Nilai Manfaat BPKH Tahun 2020, termasuk akumulasi Nilai Manfaat dan efisiensi biaya operasional BPIH untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.
 - b. Penambahan alokasi pembagian Rekening Virtual (*Virtual Account*) menjadi sebesar Rp2 triliun atau 28% dari nilai manfaat BPKH tahun berjalan kepada jemaah batal 2020 dan jemaah tunggu.
6. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk:
- a. Mengupayakan pemenuhan anggaran sarana-prasarana untuk pembelajaran online di Madrasah.

- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan Asrama Haji yang kelembagaannya belum berstatus Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi UPT Kementerian Agama RI.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 13.46 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H.YANDRI SUSANTO, Spt.